

Ringkasan Eksekutif

HASIL PENELITIAN POTRET MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN MAHASISWA MUSLIM Kasus Tiga Kampus Islam (Jakarta, Bandung, Yogyakarta)

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta

Kamis, 25 Februari 2021

Temuan Utama

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* dengan sampel dari tiga kampus target (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta). Studi kuantitatif dilakukan dalam bentuk survei yang melihat indikator moderasi beragama—komitmen kebangsaan, toleransi, dan sikap anti-kekerasan sebagai faktor resiliensi terhadap opini pro-ekstremisme-kekerasan. Studi kualitatif dilaksanakan dengan *focus group discussion* terkait pemaknaan moderasi beragama dalam program, strategi dan regulasi ketiga kampus target. Dari analisis regresi ditemukan bahwa banyak faktor dari moderasi beragama yang berhubungan dengan opini pro-ekstremisme-kekerasan, yang dalam kata lain berarti faktor-faktor tersebut merupakan faktor resiliensi terhadap ideologi pro-ekstremisme-kekerasan. Namun terdapat beberapa faktor yang relatif rentan dan dapat dikuatkan, yaitu faktor empati terhadap penganut agama lain (empati eksternal), dalam bentuk skor kemampuan pengambilan perspektif yang relatif rendah, dan empati terhadap aliran lain di dalam Islam (empati internal), dengan skor penolakan terhadap penganut aliran lain di dalam Islam masih relatif tinggi. Kedua faktor ini adalah operasionalisasi dari toleransi. Walau dari segi kebijakan terbilang baru, sudah ada usaha dari tiga PTKIN ini dalam mempromosikan moderasi beragama dalam hal pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, budaya organisasi dan kegiatan kemahasiswaan. Namun tetap diperlukan panduan/modul pedoman dalam menjamin keberlanjutan dan keadeguan promosi moderasi beragama disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang terstruktur dalam *mainstreaming* moderasi beragama di PTKIN. Selain itu, perlunya penguatan struktur kelembagaan Rumah/Institusi Moderasi Beragama agar lebih leluasa dalam mengatur kegiatan dan anggaran untuk memastikan promosi moderasi beragama di PTKI berjalan.

Pendahuluan

Moderasi Beragama merupakan konsep yang diinisiasi Kementerian Agama sebagai upaya menjawab tantangan Negara Bangsa yang dalam dekade belakangan dihadapkan dengan gerakan ekstremisme beragama. Moderasi beragama secara konseptual adalah sikap beragama yang seimbang (moderat) antara pengalaman agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan dalam praktik beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama (Moderasi Beragama, Kemenag, 2019).

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah elemen penting dalam mengembangkan serta mengarusutamakan konsep moderasi beragama. Setidaknya karena dua hal, *pertama*, perguruan tinggi keagamaan Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama yang menjadi inisiator konsep, dan *kedua*, perguruan tinggi keagamaan Islam adalah pusat kajian-kajian keislaman, sebagai agama yang dianut mayoritas umat beragama di Indonesia. Atas pemikiran ini, Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-

3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama.

Rumah Moderasi Beragama (RMB) merupakan lembaga pelaksana penyelenggara penguatan moderasi beragama di lingkungan PTKI. Pelekatan kedudukannya di dalam PTKI mendorong RMB untuk terlibat secara aktif ke dalam peran dan fungsi tridharma perguruan tinggi. RMB ditugaskan menjadi pusat edukasi, pendampingan, pengaduan dan penguatan wacana gerakan moderasi beragama di lingkungan PTKIN.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam selama ini dikenal sebagai salah satu pilar Islam moderat di Indonesia. Para alumni IAIN terserap dalam kerangka berpikir moderat dalam ideologi pembangunan dan modernisasi yang pada 1980-an merupakan ideologi dominan (Jabali dan Jamhari, 2002). Namun dalam beberapa tahun terakhir, thesis tersebut tampaknya dibantah dengan temuan beberapa penelitian tentang ekstremisme kekerasan di perguruan tinggi yang juga terjadi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), dan lembaga penelitian seperti Setara Institute, CSRC, Litbang Kemenag melaporkan tentang gejala peningkatan ekstremisme kekerasan di kampus perguruan tinggi. Dalam fakta tersebut, menyandarkan wacana moderasi beragama kepada PTKI perlu dielaborasi dan ditelaah lebih lanjut. Parameter ekstremisme kekerasan yang antara lain (1) adanya paham dan ideologi transnasional yang bertujuan membangun negara Islam (*dawlah Islamiyah*) atau kekhalifahan (*kehalifah*), (2) adanya sikap takfiri, mengkafirkan mereka yang seagama, tetapi berbeda paham dan praksis keagamaan dan (3) pengharaman sikap toleran dan bermuamalah secara baik (*mujamalah*) dengan penganut agama lain (Schmid, 2015), perlu dikonfirmasi dengan konsep moderasi beragama sebagai sebuah wacana resiliensi.

Penelitian Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim ini mencoba mengurai kapasitas institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai agen moderasi beragama, baik secara sumber daya, organisasi dan regulasi. Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga terpenting dalam membangun kebijakan publik dalam menyiapkan generasi muda bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan kuat. Untuk itu, kajian elaboratif pada perguruan tinggi mutlak dilakukan untuk memberikan kapasitas kelembagaan yang tidak hanya mampu menjadi sentra kebijakan tetapi juga pengarusutamaan kebijakan, utamanya dalam moderasi beragama.

Definisi dan Konsep

Kementerian Agama telah menetapkan empat indikator sikap moderasi beragama, yakni: 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti kekerasan dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Buku Moderasi Beragama, 2019). Keempat indikator tersebut ditetapkan Kementerian Agama sebagai alat ukur untuk menilai tingkat moderasi beragama yang dipraktikkan seseorang dan seberapa kerentanan yang dimiliki. Dengan pengukuran indikator tersebut, pihak-pihak pengelola moderasi beragama dapat menemukenali dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan penguatan moderasi beragama.

Secara konseptual, keempat indikator tersebut telah memiliki landasan teori yang cukup kuat. Dalam komitmen kebangsaan, landasan nasionalisme dan Pancasila digunakan sebagai cara untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila (Ubaedillah, 2014)

Indikator toleransi merujuk kepada sikap dalam menghadapi perbedaan, yang dalam konteks relasi antaragama dideskripsikan melalui sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja

sama, pendirian tempat ibadah serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan relasi intraagama diilustrasikan oleh kemampuan menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama (Halili, 2018)

Pengukuran variabel anti kekerasan tidak dimulai dari sikap perlawanan, melainkan dimulai dari ideologi atau paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/esktrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Ideologi dan paham bermuatan kekerasan ini hanya dapat menemukan akar pertumbuhannya jika disertai dengan persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang jika dikelola secara ideologis mampu mendorong seseorang untuk membenci dan melawan dengan kekerasan dan terror (Mirra, 2019).

Sikap akomodatif pada kebudayaan lokal merupakan item untuk melihat sejauh mana penganut agama mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi dalam perilaku keberagamaannya. Item ini didasarkan pada asumsi yang belum teruji bahwa seorang penganut agama yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal. Meski demikian, catatan Azyumardi Azra terkait *Islam Wasathiyah* dapat digunakan sebagai landasan teori, bahwa aktualisasi moderasi beragama tampak pada ormas Islam Indonesia seperti Muhammadiyah, NU, al-Washliyah, Persis dan sebagainya, yang telah berkembang secara akomodatif dengan budaya lokal sejak pertengahan abad ke-13 di Indonesia (Azra, 2020).

Indikator moderasi beragama (Kemenag, 2019)

Dimensi	Kalimat Penjelasan & Keterangan	Turunan Perilaku
Komitmen Kebangsaan	"...sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan , terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara , sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme."	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan terhadap Azas Berbangsa di UUD 1945 • Melakukan aktivisme dan partisipasi sebagai warga negara yang baik • Rasa <i>trust</i> kepada negara
Toleransi (Ekstra-Intra dan Praktik yang mengakomodasi budaya lokal)	<p>"...sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini."</p> <p>"...kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi."</p> <p><i>(Kedua indikator ini digabung karena memiliki perilaku yang serupa)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toleransi: masuk ke level 4 Intercultural Stage Bennet → hanya 'menerima'. • Penelitian ini mengambil level 5 nya yaitu saling memahami dan bisa melihat dari sudut pandang orang lain (empati). • Boer & Muynck (2015) → toleransi memerlukan kesadaran memperlakukan setiap individu punya hak asasi manusia dan empati. • Empati diterjemahkan ke dalam empati antar umat beragama atau aliran agama. • Memperlakukan orang lain sesuai hak asasi manusia (keesetaraan) diukur dengan <i>social dominance orientation</i>
Anti-Kekerasan	"... radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran."	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai belief anti kekerasan

Gambar 1. Variabel Konsep Moderasi Beragama

Karena 4 (empat) indikator tersebut sifatnya masih teoritik-konseptual, untuk kebutuhan pengukuran, penelitian ini menggunakan alat ukur yang secara konsep dan teori memiliki kedekatan definisi dan tujuan dengan moderasi beragama. Pada variabel indikator komitmen kebangsaan, menggunakan kata kunci "kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan", digunakan kerangka pengukuran "Civic Attitudes" yang turunan item variabelnya terdiri dari (1) Support for democratic principles and practices (attitudes), (2) Support for democratic principles and practices (behavioural intentions), (3) Openness for diversity, and (4) Nationalism (Blasko, Costa dan Vera-Toscano, 2018).

Item variabel indikator toleransi dalam moderasi beragama mengisyaratkan sikap hormat, menerima perbedaan baik secara sosial maupun politik. Toleransi mempersyaratkan sikap memberi ruang, sedia berdialog dan mampu menyikapi kehadiran sekte minoritas. Untuk bisa mengelaborasi

indikator ini, penelitian ini menggunakan item variabel “Intra dan Interreligion Empathy” yang diadaptasi dari “Ethnocultural Empathy” (Wang dkk., 2003).

Adapun variabel indikator toleransi meliputi (1) Empathy (Afektif dan Kognitive) (2) Social Dominance Orientation. Adaptatif terhadap kebudayaan lokal diinherensikan ke dalam indikator toleransi karena secara esensi substansi berakar pada kesediaan menerima perbedaan dalam hal ini tradisi lokal dengan cara mengadaptasi dan mengakomodasi. Sementara aspek anti kekerasan diukur dengan mengadaptasi item-item dari alat ukur BRAVE (Building Resilience Against Violent Extremism) (Grossman, et al, 2020).

Adapun pro-ekstremisme kekerasan dengan parameter sejauh mana persetujuan partisipan terkait penggunaan kekerasan dalam menegakkan syariat dan mengganti ideologi negara menjadi negara Islam. dieksplorasi melalui item variabel “Riset Api dalam Sekam” (Halili, 2018). Item-item dalam “Riset Api dalam Sekam” telah digunakan oleh banyak penelitian dalam mengukur tingkat ekstremisme kekerasan seseorang. Dalam penelitian ini, item-item pro ekstremisme kekerasan berfungsi sebagai kriteria dengan variabel moderasi beragama sebagai predictor.

Sebagai studi kelembagaan, kajian pengukuran moderasi beragama yang secara kuantifikasi didasarkan pada 4 (empat) indikator dikonfirmasi ke dalam kualitas institusi perguruan tinggi secara regulatif, struktur dan administratif. Penilaian kualifikasi institusi menggunakan konsep “Measuring Capacities UNDP” yang mengelaborasi tiga komponen; (1) Kinerja (performance), (2) Kemampuan beradaptasi (adaptability), dan (2) Stabilitas (stability).

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan landasan teoritis di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana gambaran “Moderasi Beragama” di lingkungan PTKIN yang melingkupi
 - a. Sikap dan perilaku moderasi beragama *civitas academica* PTKIN
 - b. Implementasi Moderasi Beragama dalam Kebijakan Program di PTKIN
2. *Capacity Building* apa yang dibutuhkan PTKIN dalam meningkatkan moderasi beragama?
3. Sejauh mana *capacity building* yang dilakukan efektif dalam meningkatkan moderasi beragama di PTKIN?

Program yang ditawarkan adalah *Riset dan Capacity Building* pada Kapasitas Institusi PTKIN berfokus pada moderasi beragama. Riset sendiri ditujukan untuk mengecek kondisi awal PTKIN terkait moderasi beragama dan asesmen kebutuhan *capacity building* apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan moderasi beragama. Selain itu riset juga digunakan dalam menguji efektivitas *capacity building* yang dilakukan.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan pada lingkup PTKIN. PTKIN yang dipilih merupakan PTKIN yang dipandang mampu menjadi *role model* bagi PTKIN lain sehingga jika *capacity building* dilakukan dan teruji efektivitasnya, dapat menjadi *best practice* bagi PTKIN lain. Adapun PTKIN dimaksud adalah (1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; (2) UIN Sunan Gunung Djati Bandung (3) UIN Sunan Kalijaga, DI Yogyakarta

Penelitian ini menggunakan mix metode; metode kuantitatif dan kualitatif. Studi kuantitatif dilakukan dengan teknik survei kepada populasi mahasiswa dan non mahasiswa yang meliputi dosen, tenaga kependidikan dan pejabat. Kedua kategori populasi diambil secara acak (*stratified*

random sampling) dari setiap sub kelompok fakultas dan tingkat semester (tahun ke-1 hingga tahun ke-3). Untuk membuat estimasi jumlah sampel yang diperlukan, peneliti membuat kalkulasi menggunakan G*Power (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009). Berdasarkan perhitungan *power* untuk analisis *linear multiple regression* dengan 4 prediktor, mengikuti jumlah komponen moderasi beragama, dan prediksi *effect size* kecil ($f^2 = .02$), dan *power* = .95, dibutuhkan total sampel 934 orang untuk mendeteksi adanya efek.

Berdasarkan perhitungan ini, data yang dibutuhkan sebanyak 1080 orang mahasiswa dan 180 orang non-mahasiswa. Jumlah sampel mahasiswa diperbanyak untuk mengantisipasi *effect size* actual yang lebih kecil, sedangkan jumlah sampel dari populasi non-mahasiswa ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah non-mahasiswa yang secara aktual kemungkinan tidak banyak. Jumlah ini dibagi ke tiga PTKIN target secara merata. Bisa dilihat di Gambar 2.

Jenis Populasi	Sub-Populasi	Deskripsi populasi	Kuota N per rumpun fakultas	Kuota N per PTKIN	Kuota N total
Mahasiswa (Kuota N = 1080)	Mahasiswa umum	Mahasiswa tahun ke-1 hingga tahun ke-3, meliputi mahasiswa umum	106	318	954
	Mahasiswa Key Actor	Merupakan nama mahasiswa aktif yang dirujuk oleh partisipan mahasiswa umum	14	42	126
Non-mahasiswa (Kuota N = 180)	Dosen Key Actor	Merupakan nama mahasiswa aktif yang dirujuk oleh partisipan mahasiswa umum	10	30	60
	Dosen PKN dan Studi Islam	Dosen yang mengajar mata kuliah PKN dan Studi Islam	4	12	36
	Pejabat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Pejabat fakultas yang berwenang mengeluarkan kebijakan strategis terkait Akademik dan Kemahasiswaan	6	18	54

*akan dibuat quota seimbang untuk gender perempuan dan laki-laki

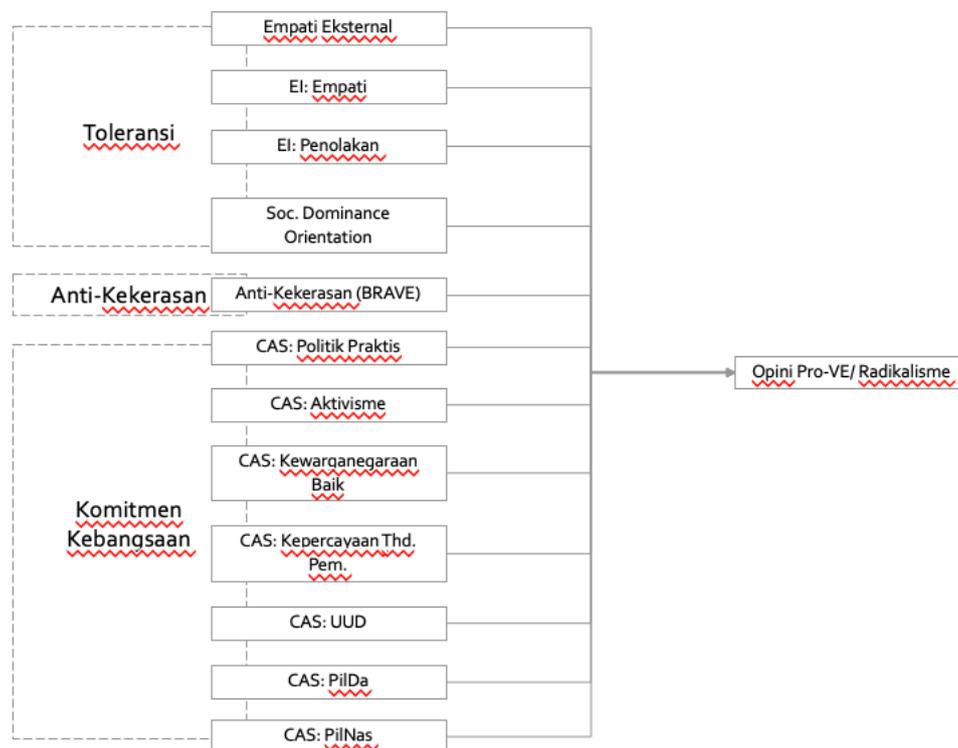
Gambar 2. Ilustrasi Sampling Survey

Mahasiswa rujukan adalah mahasiswa yang dianggap berpengaruh terhadap pandangan politik dan agama oleh mahasiswa yang direkrut secara *random*. Dosen dan pejabat fakultas terdiri dari beberapa sub-populasi; dosen PKN dan studi Islam yang direkrut secara *random*, dosen yang dirujuk oleh partisipan mahasiswa umum, dan pejabat-pejabat fakultas. Dalam rekrutmen partisipan kami mengupayakan agar sampel seimbang secara gender. Sebagian besar pengisian survei dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Limesurvey, kecuali ada permintaan khusus dari partisipan dosen dan pejabat fakultas untuk mengisi dengan bertemu langsung.

Variabel prediktor yang diukur dalam studi kuantitatif adalah empati, *social dominance orientation*, anti-kekerasan, serta perilaku dan sikap kewarganegaraan. Variabe-variabel ini merupakan operasionalisasi dari moderasi beragama. Pengukuran variabel empati dilakukan menggunakan alat ukur adaptasi dari *ethnocultural empathy* (Wang, et al. 2003), yang dibagi menjadi empati terhadap penganut agama lain, yang di dalam penelitian ini kami gunakan agama Kristen sebagai acuan (empati eksternal) dan penganut aliran lain yang dianggap sesat (empati internal). Aliran yang digunakan untuk pengukuran empati internal adalah berdasarkan pilihan partisipan terkait aliran mana yang dia anggap paling sesat atau berbeda dengan Islam yang dia praktekan (mis. Ahmadiyah, Syiah).

Social Dominance Orientation (SDO) adalah kecenderungan individu untuk menyetujui hierarki dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat, diukur dengan adaptasi SDO7 (Ho, et al. 2015). Untuk mengukur sikap anti-kekerasan, kami menggunakan adaptasi dari sebagian dari skala BRAVE (Grossman, et al. 2020). Variabel-variabel prediktor ini diuji apakah dapat memprediksi variabel kriteria, yaitu kesetujuan dengan opini-opini yang menjustifikasi tindakan-tindakan kekerasan atas nama Islam atau negara Islam, yang diukur dengan menggunakan revisi skala Opini Pro Ekstremisme Kekerasan /OpVERad, yang dibuat oleh PPIM.

Semua skala yang digunakan adalah skala Likert 1-6 (mis. Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Agak Tidak Setuju, Agak Setuju, Setuju, Sangat Setuju). Analisis yang akan dilakukan adalah menguji apakah variabel-variabel moderasi beragama benar-benar memprediksi variabel OpVERad (Gambar 3). Untuk melakukan ini, kami menggunakan *multilevel regression* dengan populasi mahasiswa umum sebagai sampel analisis.



Gambar 3. Model yang diuji dalam analisis regresi

Metode kuantitatif digunakan pada penelitian ini sebagai “baseline”, yang tujuannya mendapatkan gambaran awal sampel, serta variabel yang menjadi target intervensi. Prosedur dalam pengisian survei dilakukan secara online menggunakan platform Limesurvey yang diambil secara langsung dengan mengundang partisipan ke dalam satu pertemuan zoom. Setiap satu sesi pengambilan survey diikuti oleh salah satu jenis populasi. Di dalam satu sesi pengambilan data, peserta akan dipandu oleh dua orang peneliti pendamping. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data survey yang valid. Peran peneliti pendamping untuk mendampingi proses sehingga partisipan dapat memiliki kesempatan bertanya, mengkonfirmasi item pertanyaan dan bahkan jika hendak mengundurkan diri sebagai partisipan dapat secara langsung menyampaikannya kepada peneliti pendamping. Setelah selesai, partisipan akan mengabari peneliti pendamping, dan salah satu peneliti pendamping akan memeriksa jawaban partisipan di Limesurvey, untuk memastikan tidak ada jawaban yang tidak sengaja terlewat.

Temuan yang dihasilkan dari survey kuantitatif dikonfirmasi ke dalam studi kualitatif yang dilakukan melalui kegiatan *focus group discussion* dengan empat jenis peserta yaitu mahasiswa tingkat 2, mahasiswa *key actors* (merupakan ketua Lembaga organisasi mahasiswa atau yang namanya muncul menjadi rujukan), dosen (yang mengajar mata kuliah PPKN dan Pengantar Studi Islam, juga dosen yang namanya muncul dalam survey kuantitatif sebagai dosen rujukan) dan pihak pejabat PTKIN (Wakil Rektor, Wakil Dekan dan Ketua Lembaga/Pusat Kajian).

Pemilihan *sample* dilakukan secara *purposive sampling*. FGD dilakukan secara *online* lewat platform meeting *zoom*. Kualitatif ini berfokus pada eksplorasi penggalian pemahaman moderasi beragama di mahasiswa, penerimaan definisi dan indikator moderasi beragama di Dosen dan Pejabat serta praktik PTKIN dalam meningkatkan moderasi beragama. Analisis data kualitatif dilakukan dengan memilih beberapa tema (kumpulan *coding* dari pernyataan dalam transkrip verbatim) yang paling sering disebut dari total 12 FGD yang dilakukan

Hasil Survey

Setelah mengurangi sampel yang tidak lolos uji atensi menggunakan item *attention check* dan mengurangi jumlah pencilan statistik, total sampel yang kami gunakan dalam analisis adalah 846 orang mahasiswa, Usia rata-rata adalah 20.45 tahun. Sebanyak 48% dari partisipan adalah laki-laki.

Analisis *multilevel regression* menunjukkan hampir semua faktor dari variabel-variabel moderasi beragama memprediksi OpVERad, walau arah dari prediksinya tidak selalu sesuai dengan perkiraan awal:

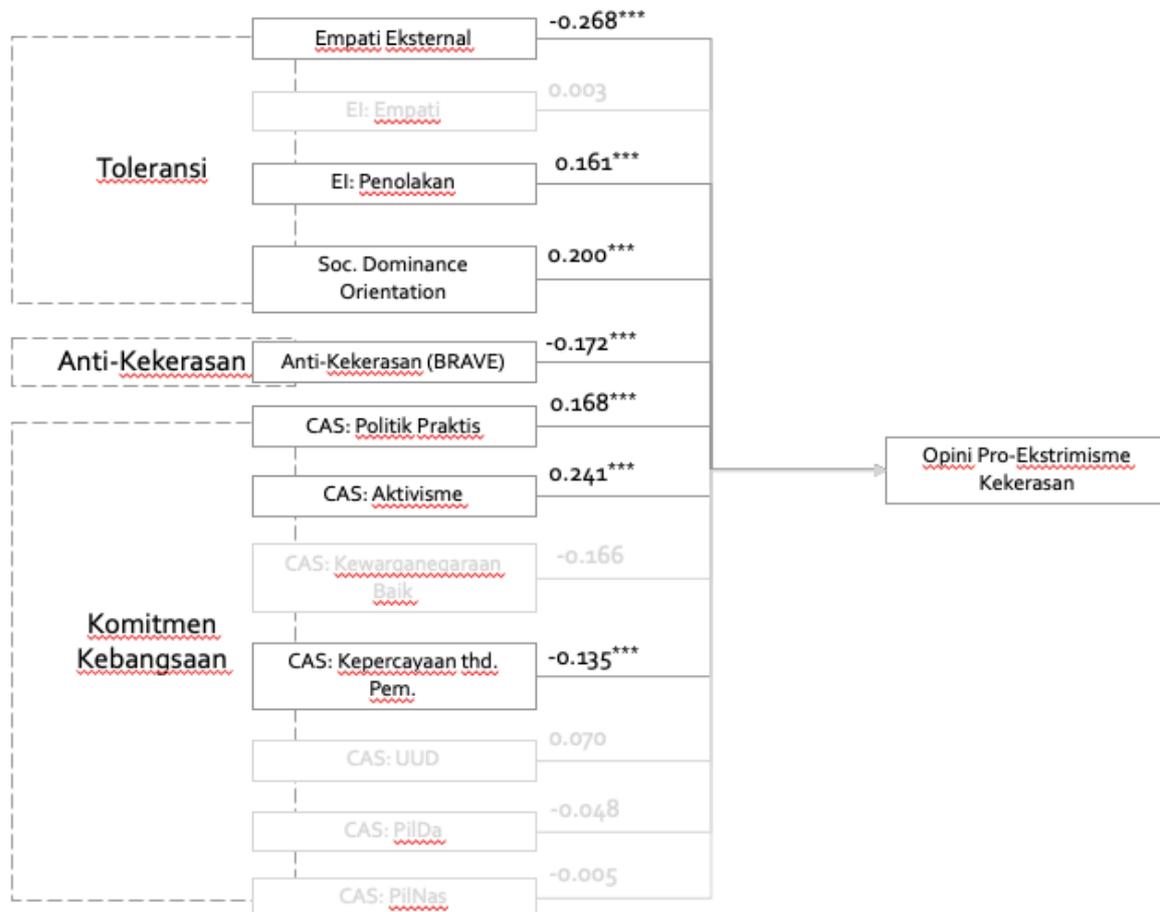
- a) Empati eksternal: lebih tinggi kecenderungan seseorang untuk berempati kepada umat agama lain, dalam hal ini spesifiknya penganut agama Kristen, lebih rendah kemungkinan ia akan menjustifikasi tindakan ekstrim untuk membela Islam atau mendirikan negara Islam.
- b) Penolakan Internal: Semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk apatis atau merasa gelisah dengan keberadaan penganut aliran lain di dalam Islam yang dianggap sesat, maka semakin ia akan semakin setuju dengan OpVERad.
- c) SDO: Semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk menyukai hierarki dan ketidak-setaraan, semakin setuju pula ia dengan OpVERad.
- d) Anti-Kekerasan: Semakin anti-kekerasan seseorang, semakin rendah kesetujuannya dengan OpVERad
- e) Politik praktis dan aktivisme: Semakin seseorang menunjukkan intensi terlibat dalam politik praktis dan aktivisme, semakin besar pula kesetujuannya terhadap OpVERad
- f) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan: Semakin besar kepercayaan seseorang terhadap sistem pemerintahan (mis. Sistem pemerintahan pusat, daerah, penegakkan hukum), semakin rendah kesetujuannya terhadap OpVERad.

Ringkasan hasil tersebut dapat dilihat di Gambar 4.

Selain dari hasil analisis regresi, kami juga melakukan analisis deskriptif untuk melihat variabel mana yang terindikasi rentan. Kami menemukan bahwa empati, baik eksternal dan internal merupakan variabel yang rentan.

Skor untuk faktor pengambilan perspektif (kecenderungan seseorang untuk mencari tahu lebih dan berusaha menempatkan diri di posisi orang lain) untuk empati eksternal masih rendah ($M=3.14$, $SD=.86$), dari skor maksimum (6). Empati secara umum untuk internal juga rendah ($M=2.92$, $SD=.89$), dan penolakan tinggi ($M=3.67$, $SD=.97$). Hal ini menunjukkan baik empati eksternal dan internal dapat dijadikan target intervensi di ketiga PTKIN tersebut.

Dari temuan ini kami mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, hampir semua variabel moderasi beragama memprediksi OpVERad secara signifikan. Hal ini mendukung anggapan bahwa moderasi beragama, paling tidak dalam operasionalisasinya sebagai sebuah keterampilan sosial, memprediksi pandangan-pandangan ekstrim dalam memperjuangkan agama. Kedua, untuk kepentingan intervensi, kami menemukan bahwa empati adalah aspek moderasi beragama yang mungkin paling penting untuk dijadikan target.



Gambar 4. Model hasil analisis. Angka menunjukkan koefisien regresi yang tidak terstandardisasi (lebih besar maka lebih besar pula kekuatan variabel tersebut dalam memprediksi OpVERad), dan bintang (*) menandakan hubungan yang signifikan secara statistik.

Hasil Kualitatif

Terminologi Moderasi Beragama

Dari 4 (empat) indikator moderasi beragama, toleransi merupakan *term* yang paling banyak didiskusikan oleh mahasiswa peserta FGD. Pembahasan mengenai toleransi berlangsung baik eksternal (antar pemeluk agama) maupun internal (antar aliran dalam satu agama).

Term kedua yang menjadi lokus kajian adalah komitmen kebangsaan yang terejawantahkan melalui persetujuan atas Pancasila dan UUD NRI 1945 yang diyakini telah sesuai dengan ajaran/nilai agama Islam dan memenuhi unsur nasionalisme/cinta tanah air. Anti kekerasan merupakan *term* yang tidak banyak dibicarakan dalam diskusi, namun muncul *term* serupa seperti tidak ekstrem.

Tidak ekstrem yang dimaksud di sini adalah terkait dengan tidak berada dalam posisi yang ekstrem kanan/kiri, tidak berlebihan dalam beribadah, atau tidak berlebihan memaksakan sesuatu paham ajaran agama tertentu.

Indikator dan definisi yang dipakai dalam penelitian ini juga diterima oleh mayoritas Dosen dan Pejabat, namun kalangan Dosen dan Pejabat kampus di 3 (tiga) Perguruan tinggi masih memandang konsep moderasi beragama belum memiliki operasionalisasi perilaku moderasi beragama dengan *clear cut* yang jelas.

Beberapa responden memberikan masukan revisi terkait indikator moderasi beragama dimana revisi yang dimaksud adalah dengan mengkombinasikan indikator yang ada dengan 12 nilai moderasi beragama (*Tawasuth, I'tidal, Tawazun*, dan seterusnya) atau menambahkan komitmen keagamaan yaitu menjalankan ajaran agama dengan benar.

Implementasi Moderasi Beragama

Secara general, para Peserta FGD meyakini ada faktor-faktor yang dianggap dapat memengaruhi fluktuasi moderasi beragama seseorang, antara lain: wawasan keagamaan, latar belakang keilmuan dan pengalaman individu dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan, eksposur dari media terkait dengan ekstremisme kekerasan serta keikutsertaan dan/atau relasi individu dalam organisasi kemahasiswaan.

Para Dosen dan Pejabat secara tegas menyatakan bahwa moderasi beragama sudah menjadi agenda bahkan ruh bagi PTKIN. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengacu kepada materi “Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya”, karya Prof. Dr. Harun Nasution. UIN Sunan Kalijaga merujuk kepada Prof. Dr. Abdul Mukti Ali yang memprakarsai Dialog Antarumat Beragama dan merevitalisasi forum Musyawarah Antarumat Beragama.

Sebagai sebuah terminologi, moderasi beragama telah menjadi tema program dan kegiatan ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan seminar, kegiatan kemahasiswaan, Pengenalan kampus dan berbagai webinar menggunakan tema inti moderasi beragama. Namun, sebagai sebuah konsep kerja yang terejawantahkan ke dalam satu sistem institusi, ketiga perguruan tinggi sepakat belum memiliki konsep operasional yang jelas.

Bahwa tetap ditemukan unsur-unsur moderasi beragama dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan pendekatan andragogi, sifatnya berdasarkan penuturan responden FGD masih sendiri-sendiri. Pada ketiga perguruan tinggi, data dan prosedur serta mekanismenya secara terpadu belum ditemukan. Ini artinya gerakan moderasi beragama masih bersifat individual-personal, belum menjadi gerakan kelembagaan.

Ketiga perguruan tinggi juga mengakui terdapat dosen-dosen yang belum *inheren* dengan moderasi beragama, bahkan tidak memiliki ruh moderasi sebagaimana identitas UIN yang telah ada sejak masa IAIN. Beberapa dosen menganggap perubahan IAIN ke UIN yang membuka peluang dosen dari luar UIN yang tidak berada dalam satu identitas yang sama sebagai pemicu hal ini. Oleh sebab itu, secara mayoritas, baik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan merasa penting Rumah Moderasi Beragama untuk hadir.

Empati: Variabel Rentan Intoleransi

Temuan hasil survey yang mengisyaratkan nilai empati yang tidak stabil di hampir semua kalangan, baik di Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan pada ketiga Perguruan Tinggi Negeri sasaran penelitian mengindikasikan kerentanan pada Indikator Toleransi.

Hal ini bukan berita baik bagi PTKIN yang selama ini mengklaim diri sebagai bagian dari program moderasi beragama. Ekstremisme beragama bisa muncul dari persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang.

Dengan tingkat kerentanan yang tinggi, empati bisa berubah menjadi antipati, mendorong lahirnya perasaan terancam yang jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya.

Beberapa saran yang muncul dari peserta FGD untuk mengoperasionalkan moderasi beragama ke dalam sistem kurikulum, misalnya dengan mengintegrasikannya ke dalam satu proses pembelajaran MKDU dengan menggunakan metodologi pembelajaran tertentu yang mendorong keterbukaan dan mampu meningkatkan empati, dapat menjadi pertimbangan dalam menghadapi kerentanan ini.

Selain itu, PTKIN juga diharapkan dapat memperbanyak kegiatan yang melibatkan interaksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Dari segi organisasi, diharapkan adanya operasionalisasi visi-misi yang terintegrasi terkait dengan moderasi beragama yang dikawal dengan monitoring dan evaluasi kegiatan *mainstreaming* yang dilakukan. Adanya kebutuhan untuk regulasi rumah moderasi beragama untuk menjadi ortaker juga diajukan dalam FGD. Selain itu PTKIN juga harus ikut terlibat dalam sosialisasi moderasi beragama di masyarakat.

Tiga perguruan tinggi secara kapasitas memiliki SDM yang cukup untuk dapat menuangkan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam satu konsep kurikulum terpadu.

Rumah Moderasi Beragama (RMB)

Tiga perguruan tinggi negeri sasaran penelitian sepakat dan mendukung penuh edaran Ditjen Pendidikan Islam No B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tentang Pembentukan Rumah Moderasi Beragama. Akan tetapi bagaimana menjalankan peran, tugas dan fungsinya, ketiga perguruan tinggi negeri masih belum memiliki konsep dan arah yang jelas.

Pembentukan RMB baik di UIN Jakarta, Bandung dan Yogyakarta sifatnya non-struktur, sehingga kewenangan dan ruang lingkup jangkauan pergerakannya secara internal dan eksternal pun terbatas. Sebagai lembaga non struktur, Rumah Moderasi Beragama tidak memiliki hak anggaran, perencanaan, indikator kinerja dan pembiayaan. Akibatnya pengawasan dan pengukuran atas keberlangsungan peran, tugas dan fungsi sifatnya *optional*.

Dengan posisinya tersebut, tumbuh kembang Rumah Moderasi Beragama sangat bergantung pada kebijakan dan arah strategi Institusi Induknya, Perguruan Tinggi dan jajaran di dalamnya. Tanpa itikad yang kuat dari organisasi yang ada di dalam struktur, lembaga non struktural seperti RMB pada akhirnya hanya sekedar nama.

RMB di ketiga perguruan tinggi secara bersamaan disahkan dan dibentuk pasca edaran terbit. RMB di UIN Jakarta adalah Pusat Kajian Moderasi Beragama yang disahkan di November 2020. RMB di UIN Bandung bernama Rumah Moderasi Beragama disahkan di awal tahun 2020 dan RMB di UIN Yogyakarta adalah Pusat Moderasi Beragama dan Kebhinekaan yang ditetapkan juga di November 2020.

Usia pembentukan RMB yang masih belia, fondasi kelembagaan yang belum jelas dan ruh *wasathiyah* yang tereleminir bersamaan dengan meluasnya peminat UIN yang tidak terkoneksi dengan ormas Islam *wasathiyah*, menjadi tantangan tersendiri bagi Rumah Moderasi Beragama. Jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan cepat dan tersistematis, kegelisahan yang disebut Azyumardi Azra dengan “Pertarungan Ideologis” mungkin akan kehilangan simpul moderasinya.

Selain itu, walau secara nilai visi-misi PTKIN sudah dipersepsi mengandung nilai moderasi Beragama, tetap diperlukan kejelasan operasionalisasi visi-misi PTKIN ini. Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi juga menghambat proses implementasi memasukkan nilai moderasi beragama di PTKIN itu sendiri.

Kesimpulan

Moderasi Beragama sebagai sebuah konsep tampaknya telah diterima secara matang, diakui dan dirasakan kebutuhannya oleh ketiga Perguruan Tinggi (UIN Jakarta, Bandung dan Yogyakarta). Namun secara operasional dan praktikal, masih jauh panggang dari api.

Tingkat kerentanan pada unsur Empati yang memfluktuasi nilai toleransi dan intoleransi di garis tipis menunjukkan bahwa secara sumber daya, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masih belum ideal untuk dinyatakan sebagai agen moderasi beragama. Ini artinya dengan kondisi empati yang sekarang, ada potensi gejala ekstrimisme kekerasan masih bisa tumbuh dan berkembang, sehingga membutuhkan strategi operasionalisasi moderasi beragama yang terstruktur dan berkesinambungan.

Hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan tentang gejala ekstrimisme kekerasan di perguruan tinggi keagamaan Islam terkonfirmasi positif kembali melalui penelitian ini, sehingga perlu dilakukan intervensi terhadap kelembagaan (institusi) perguruan tinggi, yang salah satunya antara lain dengan mengoptimalkan peran Rumah Moderasi Beragama.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, sebagai bagian dari otoritas kebijakan pendidikan, sebagai berikut:

- (1). Regulasi Struktur Kelembagaan Rumah Moderasi Beragama yang jika dimungkinkan menjadi bagian terpadu dalam Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Perguruan Tinggi, jika tidak dimungkinkan mengingat agenda penyederhanaan birokrasi, mungkin dapat dibuat regulasi khusus advokasi struktur dimana program dan kegiatan turunan moderasi beragama dilembagakan ke dalam satu mata kuliah tertentu dan atau kegiatan pelatihan bersertifikat sebagai syarat kompetensi dalam SKPI;
- (2). Indeks pengukuran terpadu sebagai alat evaluasi moderasi beragama di PTKIN, hal ini dapat menjadi alat deteksi dini kerentanan dan ketahanan moderasi beragama di masing-masing perguruan tinggi, sehingga PTKIN sebagai simpul Islam *wasathiyah* dapat terus terjaga eksistensinya;
- (3). Modul dasar bagi masing-masing Rumah Moderasi Beragama dalam mengembangkan bidang cakupannya yang terdiri dari Modul Pendidikan dan Pelatihan, Model Kajian dan Penelitian serta advokasi dan pendampingan masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014
- Abdillah, M. (2015, 9 Februari). Meneguhkan Moderasi Beragama. *Kompas*. Diakses pada <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=17325>
- Abdullah, M. (2019). Argumen pengarusutamaan budaya dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam proyek moderasi beragama di Indonesia. Dalam A, Ahmala. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS
- Alex P. Schmid, *Challenging the Narrative of the "Islamic State"*, (Netherlands, ICCT-The Hague, 2015)

- Azra, Azyumardi, *Relevansi Islam Wasathiyah dari Melindungi Kampus hingga Mengaktualisasi Kesalehan*, Jakarta, Kompas, 2020
- Azyumardi Azra, *Islam Indonesia Inklusif VS Eksklusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin*, Makalah untuk Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah, Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, 6 Juni 2017
- Azyumardi Azra, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Jakarta, Rajawali Press, 1999
- Bennett, M. (2017) Development model of intercultural sensitivity. Dalam Kim, Y (Ed). *International encyclopedia of intercultural communication*. Wiley
- Botticher, A. (2017). Towards Academic Consensus Definitions of Radicalism and Extremism. *Perspective On Terrorism*, 11(4), 73-77
- Broer, N.A., Munyck, B., Potgieter, F.J. (2019). On Measuring Religious Tolerance in Education. *Conference Paper*. Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods*, 41, 1149-1160.
- Decety, J., & Jackson, P.L. (2004). The Functional Architecture of Human Empathy. *Behavioral and Cognitive Neuroscience*, 3 (2), 71-100
- Elliott, R., Bohart, A.C., Watson, J.C., & Greenberg, L.S. (2011). Empathy. Dalam J. Norcross (ed.), *Psychotherapy relationships that work* (2nd ed.) (pp. 132-152). New York: Oxford University Press.
- Hafez, M., & Mullins, C. (2015). The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to Homegrown Extremism. *Studiens in Conflict & Terrorism*, 38(11), 958-975
- Ho, A.K., Sidanius, J., Kteily, N., Sheehy-Skeffin, J., Pratto, F., Henkel, K.E., Foels, R., Stewart, A.L. (2015). The Nature of Social Dominance Orientation: Theorizing and Measuring Preferences for Intergroup Inequality Using the New SDO7 Scale. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2015, Vol. 109, No. 6, 1003–1028
- Kamali, M.,H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam*. New york: Oxford University Press.
- M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, LP3ES, 2008
- Mirra Noor Milla, *Understanding Intergroup Contact on Terrorist Prisoners in Indonesia*, dalam Journal Learning From Violent Extremist AttacksL Behavioural Sciences Insights for Practitioners and Policymakers, World Scientific, Singapore, 2019
- Mukri, M. (2019). Moderasi Islam Indonesia: Penguatan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam A, Ahmala. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS
- Nizar, S. (2019). Moderasi Agama: Memperkuat fungsi kekhalifahan dalam budaya global. Dalam A, Ahmala. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS
- Pratto, Felicia, James Sidanius, Lisa M. Stallworth, and Bertram F. Malle. 1994. Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. *Journal of Personality and Social Psychology* 67, no. 4: 741-763.
- Saidurrahman, T.G.S., (2019). Penguatan moderasi Islam Indonesia dan Peran PKTIN. Dalam A, Ahmala. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LKiS
- Saputra, R. E. (2018a). Api dalam Sekam : Keberagaman Generasi Z, 1(1).

- Saputra, R. E. (2018b). Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam, 1(8).
- Wang, Y.W., Davidson, M.M., Yakushko, O.F., Savoy, H.B., Tan, J.A., & Bleier, J.K. (2003). The Scale of Ethnocultural Empathy: Development, Validation and Reliability. *Journal of Counseling Psychology*, 50 (2), 221-234